

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, salah satunya dengan mengembangkan standar akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dirancang untuk memberikan pedoman dasar penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. SAP merupakan persyaratan hukum untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. (Oktavia et al., 2021)

Indonesia mengalami perubahan dari basis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Perubahan ini sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik serta bermanfaat dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai panduan atas laporan keuangan berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Sistem informasi berbasis akrual menggambarkan neraca dan menyajikan laporan keuangan yang berguna untuk menilai kinerja keuangan (Nurlaila, 2021). Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum.

Beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini adalah laporan keuangan pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan atas Laporan

Kuangan (CaLK). Sedangkan pada SAP baru (PP No. 71 tahun 2010) komponen laporan keuangan terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (7) Catatan atas Laporan Keuangan. (Wiryaningsih et al., 2017)

Kewajiban untuk menerapkan akuntansi pada tahun 2015 mengharuskan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus mempersiapkan diri untuk mendorong kesuksesan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Basis akrual saat diterbitkannya PP No. 71 tahun 2010 tidak langsung diterapkan, akan tetapi pemerintah menerapkan akuntansi kas menuju akrual (cash toward accrual) selama 4 tahun. Hal ini sebagai adaptasi atas adanya perubahan basis kas ke basis akrual dan tidak terjadi ketimpangan. Pada 2015, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual ini tidak langsung diterapkan, akan tetapi terdapat penundaan dengan diterapkannya akuntansi kas menuju akrual. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi pemerintah berbasis akrual relatif lebih kompleks dibandingkan dengan pencatatan berbasis kas maupun berbasis kas menuju akrual. Pengalaman dari negara-negara yang telah sukses maupun yang mengalami kegagalan perlu dijadikan pelajaran agar penerapan akuntansi berbasis akrual berhasil diterapkan pemerintah Indonesia. (Desipradani & Rusmawati, 2017)

Kompleksitas pada akuntansi pemerintah berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi ini berupa hardware dan software, database, dan jaringan. Dibutuhkan teknologi informasi yang memadai dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis akrual (Desipradani & Rusmawati, 2017). Tata kelola teknologi informasi lebih luas cakupannya dan berfokus pada kinerja dan transformasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan, baik dari perspektif internal maupun eksternal. Penerapan SAP

berbasis akrual dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang di mana dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Berhasil tidaknya penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut (Desipradani & Rusmawati, 2017). Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Penerapan basis akrual memerlukan penyesuaian dan terdapat beberapa kendala. Kendala dan hambatan tersebut muncul karena proses transisi dari berbasis kas seperti resistensi pegawai, kurangnya sumber daya yang kompeten, sarana dan prasarana penunjang, serta aspek budaya organisasi dan lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kasfari & Abdullah (2019) terdapat kendala penerapan basis akrual di Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh yaitu kekurangan analisis sistem yang memahami alur bisnis SAIBA dan minimnya pegawai yang memiliki dasar akuntansi karena kurangnya lulusan akuntansi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa belum menerapkan secara menyeluruh basis akrual sesuai SAP. Dalam penelitian Sartika (2019) disebutkan bahwa pada aspek komunikasi yaitu sosialisasi hanya fokus pada penggunaan aplikasi bukan terhadap pemahaman SAP sehingga pegawai kurang memahami basis akrual. Lasabuda et al. (2020) memaparkan bahwa BPKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penerapan basis akrual telah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, akan tetapi terdapat kendala pada sistem informasi yang terkadang mengalami *error* dan kurangnya tenaga ahli akuntansi.

Standar akuntansi pemerintahan sebagai acuan dalam pelaporan keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 kemudian digantikan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dari basis kas menjadi basis akrual. Hal ini berdampak besar bagi kualitas laporan keuangan pemerintah. Berikut opini BPK mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dalam pengelolaan dan pelaporan APBN.

Tabel 1.1

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004-2021

Tahun	Opini BPK	Tahun	Opini BPK
2004	TMP	2013	WDP
2005	TMP	2014	WDP
2006	TMP	2015	WDP
2007	TMP	2016	WTP
2008	TMP	2017	WTP
2009	WDP	2018	WTP
2010	WDP	2019	WTP
2011	WDP	2020	WTP
2012	WDP	2021	WTP

Sumber: www.bpk.go.id

Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat pada saat menerapkan basis kas yaitu TMP (Tanpa Menyatakan Pendapat). Kemudian saat menerapkan basis kas menuju akrual, LKPP mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Ketika diterapkannya PP No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi basis akrual pada 2015 terjadi peningkatan opini BPK yaitu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari tahun 2016 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan tujuan diterapkannya basis akrual.

Upaya penerapan basis akrual Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Pemerintah terdiri dari 2 (dua) yakni Sistem Akuntansi Aset dan Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan. Unit Akuntansi Barang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara / lembaga (Intan & Putra, 2017). Pelaporan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Bentuk pertanggungjawaban atas

pelaporan keuangan dimana didalamnya terdapat BMN adalah bentuk laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon merupakan instansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kementerian ini mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Untuk mempertahankan opini tersebut maka satuan kerja yang berada di bawah unit Kementerian hukum dan HAM harus bekerja dengan lebih baik lagi untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel termasuk Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

Penyusunan laporan keuangan tingkat satker Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yakni terdapat Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). SIMAK-BMN dan SAIBA sebagai subsistem harus saling berjalan secara simultan, dengan demikian dapat dilakukan check and balance melalui proses rekonsiliasi (pemutakhiran data). Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 terdapat beberapa kendala yaitu awalnya Pengelola Penatausahaan SIMAK-BMN dan SAIBA merasa bingung karena kurangnya pemahaman penyusunan laporan keuangan atas akuntansi berbasis akrual, penggunaan sistem aplikasi baru dan selalu melakukan pembaruan/*update* (SIMAK-BMN dan SAIBA), serta terdapat perbedaan hasil dari rekonsiliasi akibat penggunaan basis akrual.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait penerapan aplikasi SIMAK-BMN dan SAIBA berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 serta mendalami bagaimana penerapan sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan aset negara dan bagaimana penerapan sistem akuntansi instansi dalam pelaporan keuangan dari segi kualitas sistem, sumber daya manusia, dan kualitas laporan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
- b. Perlu penyesuaian pada sistem aplikasi yang melakukan pembaruan.
- c. Perbedaan hasil rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dengan SAIBA.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus maka penelitian ini dibatasi pada masalah penerapan standar akuntansi pemerintahan PP No. 71 tahun 2010 pada pengelolaan aset negara dengan aplikasi SIMAK-BMN dan penyajian laporan keuangan dengan aplikasi SAIBA dari segi kualitas sistem, sumber daya manusia, dan laporan yang dihasilkan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam pengelolaan aset negara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon?
- b. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam pelaporan keuangan berbasis akrual pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam pengelolaan aset negara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dalam pelaporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi penulis merupakan pembelajaran dalam menganalisis efektivitas sistem akuntansi instansi yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan aset negara dan pelaporan keuangan berbasis akrua.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan sistem akuntansi instansi mengenai pengelolaan aset negara dan pelaporan keuangan berbasis akrua dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA).

3. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan pengembangan dan penerapan dalam pengelolaan aset negara dan akuntansi berbasis akrua pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pegawai sub bagian keuangan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrua pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam mengelola sistem informasi BMN sehingga permasalahan terkait BMN dapat diminimalisir setelah dilakukan evaluasi terhadap sistem tersebut.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi instansi pengelolaan aset negara dan pelaporan keuangan berbasis akrual serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	I Gusti Agung Sri Wirananda dan Wulan D. Kindangen (2021)	Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif	Berdasarkan aspek kepuasan pengguna, aplikasi SIMAK-BMN sudah dapat dikatakan efektif karena dari segi kualitas sistem, kemudahan penggunaan, dan manfaat penggunaan, telah sangat membantu operator dalam melakukan penatausahaan serta pendokumentasian BMN melalui aplikasi terkomputerisasi dan integrasi antar sistem informasi. Pengendalian internal yang dilakukan dalam penerapan aplikasi SIMAK-BMN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini terdapat evaluasi SIMAK-BMN dari segi kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan, sedangkan pada penelitian penulis terdapat evaluasi penerapan SIMAK-BMN berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan analisis implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dari segi kualitas sistem, SDM, dan laporan

				Provinsi Sulawesi Utara, dapat dikatakan belum efektif karena adanya kehilangan barang dan dokumen pendukung barang tersebut akibat pengawasan, pemeriksaan, dan pengarsipan yang kurang baik. Kualitas informasi yang dihasilkan aplikasi SIMAK-BMN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, belum sepenuhnya efektif berdasarkan Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	yang dihasilkan.
2.	Intan dan Rizki Eka Putra (2017) (Intan & Rizki Eka Putra, 2017)	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Aset Negara dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual Terhadap PP No. 71 Tahun 2010 Pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang	Kualitatif	Implementasi SAI Satker Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah, yaitu PMK No. 233/PMK.05/2011 dan PP No. 71 Tahun 2010	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini terdapat analisis penerapan sistem dan prosedur pada SIMAK-BMN dan SAIBA berdasarkan PMK No.233/PMK.05/2011, sedangkan pada penelitian penulis terdapat analisis penerapan sistem dan prosedur pada SIMAK-BMN dan SAIBA berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.
3.	Dewi Sartika (2019)	Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Berdasarkan	Kualitatif (Analisis Komparatif Deskriptif)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyajikan laporan keuangan belum menerapkan secara menyeluruh PP Nomor	Pada penelitian ini tidak terdapat analisis penerapan SIMAK-BMN berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

		PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gowa		71 Tahun 2010.	
4.	I Gusti Agung Sri Wirananda (2020)	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif	Pelaksanaan SIMAK-BMN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan prosedur SIMAK-BMN tingkat UAKPB menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Namun dalam proses penginputan harus lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pencatatan barang dikarenakan banyaknya kode dan nilai harga barang yang ada dalam sistem.	Pada penelitian ini terdapat analisis prosedur SIMAK-BMN tingkat UAKPB menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Analisis, sedangkan pada penelitian penulis terdapat analisis SIMAK-BMN dan implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.
5.	Andi 'Kasfari dan Syukriy Abdullah (2019)	Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) Pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh	Kualitatif	Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua pada Balai Diklat keagamaan Provinsi Aceh belum begitu efektif. Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua pada Balai Diklat keagamaan Provinsi Aceh belum begitu efektif.	Pada penelitian ini terdapat analisis penerapan SIMAK-BMN dari segi komitmen pimpinan, sedangkan pada penelitian penulis terdapat penerapan SIMAK-BMN dari segi kualitas sistem, sumber daya manusia dan analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
6.	Ni Nengah Dwi Wiryaningsih, Ni Luh	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah	Kualitatif	Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli dilihat dari kualitas sumber daya manusia	Pada penelitian ini terdapat analisis penerapan sistem informasi penyajian

	Gede Erni Sulindawati, dan Made Aristia Prayudi (2017)	Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli		(SDM), sarana, dan prasarana IT belum sepenuhnya menguasai PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP Basis akrual	laporan keuangan dari komitmen organisasi, sedangkan pada penelitian penulis terdapat analisis penerapan sistem informasi penyajian laporan keuangan dan analisis penerapan SIMAK-BMN berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dari segi sumber daya manusia, kualitas sistem, dan laporan yang dihasilkan.
7.	Karina Oktavia, Maslichah, dan Dwiyani Sudaryanti (2021) (Oktavia et al., 2021)	Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dibadan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Kualitatif	Laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang standar Akuntansi Berbasis Akrual dan juga masih menerapkan Akuntansi Basis Kas menuju Akrual. Perlakuan kebijakan akuntansi pada laporan keuangan pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 terkait penerapan PP No 71 Tahun 2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca.	Pada penelitian ini tidak terdapat analisis penerapan SIMAK-BMN berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.
8.	Anastasya A. Lasabuda, Jenny Morasa, dan Victorina Z. Tirayoh (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola	Kualitatif	BPKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penerapan SAP Basis Akrual dalam penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun masih 80% dengan	Pada penelitian ini terdapat analisis implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dari segi aplikasi, sedangkan pada penelitian penulis terdapat

		Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara		kendala berupa sistem informasi, SDM yang kurang memadai, kurangnya tenaga ahli akuntansi dan aplikasi untuk menunjang sistem tersebut terkadang mengalami kendala (error).	analisis implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan analisis penerapan SIMAK-BMN berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dari segi sumber daya manusia, kualitas sistem, dan laporan yang dihasilkan.
9.	Gita Desipradani dan Zeni Rusmawati (2017)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Pemkot Surabaya	Kualitatif	Implementasi SAP berbasis akrual di Indonesia terutama dalam penerapan di Pemerintah Kota, telah berjalan sesuai dengan tujuan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010. Pemkot Surabaya juga selalu menerbitkan secara berkala penyajian Laporan Keuangan.	Pada penelitian ini tidak terdapat analisis SIMAK-BMN berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.
10.	Tri Handayani Amaliah, Siti Pratiwi Husain, dan Ni Wayan Selvianti (2019)	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Penatausahaan Barang Milik Negara tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Penerapan sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode yang digunakan berbeda; menggunakan variabel penatausahaan BMN, SIMAK-BMN, dan kualitas laporan Keuangan; serta tidak terdapat analisis SIMAK-BMN dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2020.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut peneliti dapat memperoleh beberapa informasi terkait penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu mengenai efektivitas SIMAK-BMN dan SAIBA berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 serta dari segi kualitas sistem, sumber daya manusia, dan laporan yang dihasilkan.

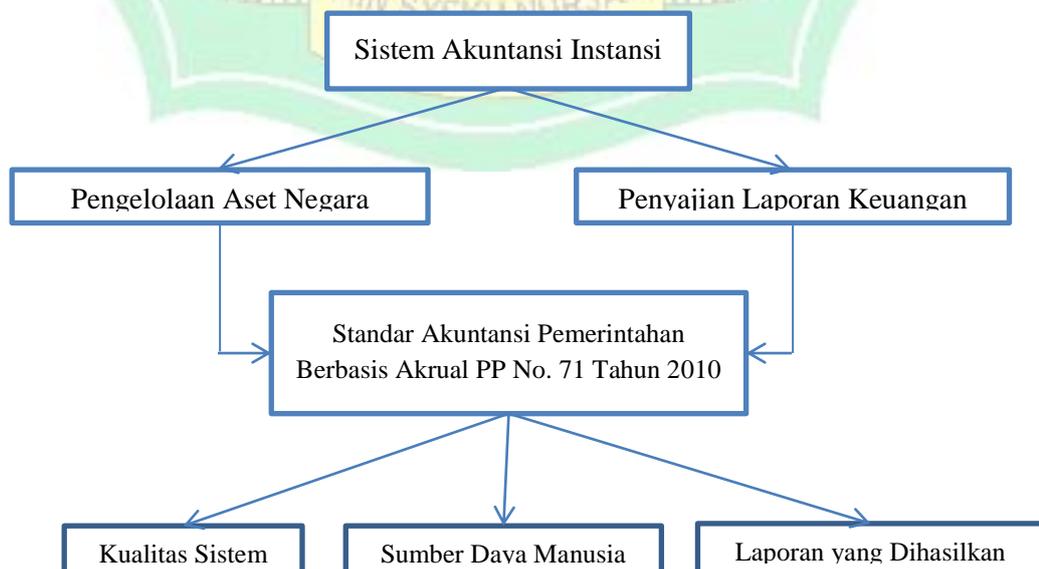
Dari sepuluh topik pembahasan yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang Efektivitas Sistem Akuntansi Instansi Dalam Pengelolaan Aset Negara dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Disinilah letak perbedaan studi ini dengan sumber-sumber penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) memiliki peran penting dalam pengelolaan aset negara dan penyajian laporan keuangan instansi. Dalam pengelolaan aset negara, perlakuan akuntansinya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan penyajian laporan keuangannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pada Kantor Imigrasi Cirebon, pengelolaan aset negara terintegrasi menggunakan Sistem Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan pelaporan keuangan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dalam menggambarkan penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan aset negara dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Jalan Sultan Ageng Tirtayasa No. 51, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, 45153 Jawa Barat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer (Ikhsan, 2012)

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

Tabel 1.3
Data Informan

Informan	Jumlah (Orang)	Keterangan	Waktu	Tempat
Bendahara	1	Mengetahui alur keuangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.	23 Februari 2022 8 Maret 2022	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon
Operator SAIBA	1	Menyusun laporan keuangan dan mengoperasikan SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.	3 Januari 2022 23 Februari 2022 8 Maret 2022	
Operator SIMAK-BMN	1	Mengoperasikan SIMAK-BMN dalam pengelolaan dan pelaporan barang milik negara.	21 Februari 2022 9 Maret 2022 28 Maret 2022	

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon 2021. Data sekunder lainnya berasal dari media internet maupun media cetak, seperti PP No. 71 Tahun 2010, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi (Nawawan, 2015).

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni ketika praktik kerja lapangan selama satu bulan dengan mengamati permasalahan apa yang terjadi mengenai pengoperasian SAIBA dan SIMAK-BMN di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Kemudian, observasi dilakukan selama bulan Januari hingga Maret untuk mengamati penggunaan aplikasi SIMAK-BMN dan SAIBA beserta sarana dan prasarana serta mengumpulkan data berupa laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

b. Wawancara (Hartono, 2018).

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Wawancara ini dilakukan dengan teknik *snowball sampling* yaitu peneliti mewawancarai Operator SAIBA dan Operator SIMAK-BMN sebagai *key informan* lalu mewawancarai Bendahara Pengeluaran karena masih memerlukan informasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu wawancara bertahap dan terstruktur. Wawancara dilakukan pada bulan Januari hingga Maret untuk menghasilkan informasi mengenai penerapan SAIBA dan SIMAK-BMN di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon 2021, Struktur

Organisasi Satker, Gambar tampilan aplikasi SAIBA, dan SIMAK-BMN yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

d. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji serta menelaah *literature* berupa buku Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PP No. 71 tahun 2010, buku Sistem Informasi Akuntansi, serta artikel ilmiah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi.

5. Keabsahan Data

a. Pengujian *Credibility*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain: (Mekariyasa, 2020)

1) Perpanjangan pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan dengan dilakukannya pengumpulan data dari bulan Januari hingga Maret karena masih membutuhkan data yaitu Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

2) Triangulasi (Sugiyono, 2018)

a) Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data pada triangulasi sumber ini yaitu dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data berasal dari wawancara dengan Bendahara Pengeluaran, Operator SIMAK-BMN, dan Operator SAIBA.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu dengan dilakukan pengecekan dengan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama. Teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengumpulan data disertai konfirmasi data yang dikumpulkan dengan waktu yang berbeda selama 3 bulan.

3) Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti dapat dipercaya, seperti adanya rekaman wawancara, foto, laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon 2021.

4) Mengadakan *Membercheck* (Mekarisce, 2020)

Membercheck yaitu melakukan pengecekan dengan kesesuaian di lapangan ketika peneliti membuat alur proses pokok akuntansi.

b. Pengujian *Transferability*

Nilai transferabilitas dengan menyajikan penjabaran secara rinci yaitu terdapat penjelasan mengenai pemanfaatan aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN serta alur proses akuntansi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, sehingga memberi wawasan bagi pembaca dalam memahami pembahasan pada skripsi ini.

c. Pengujian *Dependability*

Pengujian *dependability* pada penelitian kualitatif yaitu dengan dilakukan audit terhadap proses penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. (Sugiyono, 2018)

d. Pengujian *Konfirmability*

Pengujian *konfirmability* memiliki kesamaan dengan pengujian *dependability*, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam pengujian ini, peneliti menguji hasil penelitian dengan mengkonfirmasi kepada pihak yang telah diwawancarai mengenai kebenaran data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses reduksi data yaitu peneliti melakukan penyaringan terhadap data yang ditemukan dilapangan sesuai dengan masalah penelitian saja. Peneliti mendapatkan data laporan barang tidak berwujud yang kemudian dipilah sesuai permasalahan penelitian. Kemudian, peneliti menyaring hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran, operator SAIBA, dan operator SIMAK-BMN.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan uraian singkat, membuat *flowchart* proses pokok akuntansi, dan penyajian bagan struktur organisasi serta gambar aplikasi.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Penyusunan kesimpulan dilaksanakan selama proses penelitian berjalan yaitu kesimpulan sederhana saat telah dilakukan wawancara kemudian menyusun kesimpulan akhir dengan data yang sudah terkumpul yang sudah diuji keabsahan data, sehingga terverifikasi dan tersistematis pada pembahasan penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisikan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang didalamnya diuraikan tentang Pengelolaan Aset Negara, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN), Penyajian Laporan Keuangan, dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Kemudian menguraikan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Efektivitas Sistem Akuntansi Instansi.

BAB III : Kondisi Objektif

Bab ini membahas dan menguraikan tentang sejarah instansi, visi dan misi, struktur bagian keuangan, pemanfaatan SIMAK-BMN dalam pengelolaan aset negara, pemanfaatan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan, dan proses pokok akuntansi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan aset negara dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) berdasarkan kesesuaian dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap serta dari segi sistem, SDM, dan laporan yang dihasilkan. Pembahasan selanjutnya mengenai efektivitas penyajian laporan keuangan berbasis akrua dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) berdasarkan kesesuaian dengan PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan serta dari segi sistem, SDM, dan laporan keuangan.

BAB V : Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke-empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis atau diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan.